

Pengaruh *Good Government Governance* Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Dana Desa

Nabila Fitriana¹, Suwandi² ✉

Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gresik

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *good government governance* dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa pada Kantor Kepala Desa se-Kecamatan Plumpang sebanyak 18 Kantor Kepala Desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner melalui google form. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, yaitu memilih sampel sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 72 Aparatur Desa yang menjabat sebagai Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan Kasi Pemerintahan yang masa kerjanya minimal satu tahun. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur (path) PLS Regression (Partial Last Square) dengan menggunakan software SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan *good government governance* dan moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: *Good Government governance*, Moralitas Individu, Pencegahan Kecurangan

Abstract

This purpose of this study was to examine and analyze the influence of good governance and individual morality on the prevention of incidents (fraud) in the management of village funds in 18 Village Head Offices in Plumpang District. This type of research is quantitative research by distributing questionnaires via Google form. The sampling method in this study was a purposive sampling method, namely selecting samples according to predetermined criteria. The sample used in this study were 72 village officials who served as village heads, village treasurers, village secretaries, and head of government with a minimum working period of one year. The data analysis technique uses PLS Regression (Partial Last Square) path analysis using SmartPLS 3.0 software. The results showed that good governance and individual morality had a positive effect on fraud prevention in managing village funds.

Keywords: *Good Government Governance, Individual Morality, Fraud Prevention*

Copyright (c) 2023 Nabila Fitriana

✉ Corresponding author :

Email Address : nabilafitriana16@gmail.com, suwandi@umg.ac.id

PENDAHULUAN

Dana desa berasal dari APBN dan diperuntukan bagi desa, yang dialirkan melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa,

Pengaruh *Good Government Governance* dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan...

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun banyaknya oknum dalam menyalahgunakan anggaran yang mengakibatkan terjadinya kecurangan seperti yang diungkapkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Semester I 2021

No	Sektor	Jumlah Kasus	Total Kerugian Negara
1.	Dana Desa	55	Rp. 35,7 miliar
2.	Pemerintahan	23	Rp. 101,7 miliar
3.	Pendidikan	23	Rp. 31,5 miliar
4.	Perbankan	12	Rp. 500,6 miliar
5.	Pertahanan	11	Rp. 1.701 triliun

Sumber: ICW, 2021

Tabel pemetaan kasus korupsi pada semester I 2021 di atas memberikan informasi terkait sektor pemerintah yang menduduki peringkat lima besar dalam kasus korupsi, dan sektor yang paling rawan adalah anggaran dana desa yaitu sebanyak 55 kasus korupsi yang menimbulkan kerugian sekitar Rp 35.718.202.311. Kasus pengelolaan anggaran dana desa tidak hanya berfokus pada dana desa saja, melainkan ada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tuban Jawa Timur, menetapkan Budi Utomo Kepala Desa Bunut terlibat tindak pidana penyalahgunaan APBDes dengan Nevi Ayu Indrasari Bendahara Desa yang kini sudah menjalani hukuman selama dua tahun. Keterlibatan Budi Utomo terungkap dalam persidangan tipikor di Pengadilan Negeri Surabaya, dengan terpidana Nevi ayu Indrasari, mantan Bendahara Desa Bunut. Tersangka melakukan pemotongan pajak proyek anggaran tahun 2016 sampai tahun 2019 dengan kerugian mencapai sekitar Rp 180.000.000. Atas perbuatannya tersangka dijerat ancaman hukuman minimal di atas lima tahun penjara. Untuk kepentingan penyidikan pemeriksaan lanjutan hingga persidangan, tersangka saat ini ditahan dan dititipkan di Lapas Kelas II-B Tuban (Inews.id, 2023).

Fraud merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh pegawai, dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan pihak lain. Dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan, maka perlu dilakukan suatu langkah pencegahan yaitu pencegahan kecurangan (*fraud*). Pencegahan kecurangan (*fraud*) perlu dilakukan untuk mengendalikan seseorang agar tidak melakukan tindakan kecurangan yang akan merugikan orang lain (Hariawan et al., 2020).

Tata kelola perusahaan dapat diartikan sebagai aturan yang mengkoordinasikan dan mengendalikan suatu organisasi agar tercapai keseimbangan antara kekuasaan dan wewenang organisasi dalam memberi tanggung jawab kepada shareholder khususnya dan stakeholder pada umumnya (Nisa & Suwandi, 2022). Adanya tata kelola perusahaan dapat menggambarkan kondisi organisasi baik atau buruk, dan berperan dalam meningkatkan nilai suatu organisasi sebagai hasil dari sistem tata kelola perusahaan yang dipandang cocok memeriksa perusahaan (Pratiwi, 2022). Dalam tata kelola pemerintahan atau *good government governance* cara pemerintah untuk membangun pemerintahan yang sehat dan bertanggung jawab yaitu dibangun sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi (Prameswari et al., 2022). Dengan adanya prinsip tersebut diharapkan dapat mencegah individu maupun kelompok dalam suatu lembaga atau organisasi agar tidak melakukan kecurangan. Penelitian yang

dilakukan oleh (Inawati & Sabila, 2021) dan (Prameswari et al., 2022) menunjukkan bahwa *good government governance* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Moralitas individu merupakan nilai yang berhubungan dengan baik buruknya perbuatan yang dilakukan oleh individu. Moral seseorang dapat diketahui dari kepribadian dan pola pikir yang selalu ingin menjunjung tinggi kejujuran serta keadilan, pola pikir yang demikian dapat membuat seseorang sadar dan menurunkan rasa ingin menjalankan kecurangan (Dewi et al., 2017). Penelitian moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan pernah dilakukan oleh (Laksmi & Sujana, 2019) dan (Anandya & Werastuti, 2020) yang hasilnya menunjukkan bahwa moralitas memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Teori kontijensi mengarahkan perhatiannya tergantung pada situasi. Teori kontijensi beranggapan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses kemampuan seorang pemimpin melakukan pengaruhnya tergantung pada situasi. Menurut penelitian (Otley, 1980) dalam (Pramesti et al., 2020) pendekatan kontijensi adalah suatu usaha untuk menentukan kegiatan penelitian, praktik, dan teknik manajerial mana yang paling cocok dalam situasi tertentu. Jika di dalam suatu lingkungan organisasi maupun pemerintahan terdapat potensi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan, maka dibutuhkan upaya efektif sesuai dengan situasi tersebut. *Good government governance* sebagai salah satu upaya yang bisa dilakukan, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip *good government governance* seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi untuk menekan terjadinya kecurangan. Dengan adanya keterbukaan pemerintah desa mengenai keuangannya maka kebebasan mendapatkan informasi mengenai proses dana yang digunakan untuk kepentingan dan aspirasi masyarakat jauh lebih mudah, pelaku kecurangan akan merasa segan jika ingin melakukan kecurangan dalam bentuk apapun karena secara otomatis ada partisipasi masyarakat juga di dalamnya. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penggunaan dana secara tepat, terhindar dari pemborosan dan kecurangan dana desa.

Menurut teori perkembangan moral model Kohlberg (1995), perilaku etis didasarkan pada penalaran moral. Dalam (Aprilia & Yuniasih, 2021) terdapat tiga tingkat perkembangan moral yaitu tahapan moral terendah (*pre-conventional*), tahapan moral kedua (*conventional*) dan tahapan yang tertinggi (*post-conventional*). Menurut penelitian (Liyanarachchi & Newdick, 2009) dalam (Rosari et al., 2021) perbedaan perilaku antara orang yang mempunyai tahap penalaran moral rendah dengan orang yang memiliki tahap penalaran moral tinggi yaitu disaat mereka mengalami dilema etika. Semakin tinggi tahap penalaran moral seseorang, maka semakin mungkin seseorang melakukan dan menunjukkan hal yang benar. Di sisi lain, orang dengan pemikiran moral rendah cenderung melakukan hal-hal yang tidak benar ketika dihadapkan pada suatu masalah. Selain itu mereka sering memandang kepentingan pribadi sebagai hal utama dalam melakukan suatu tindakan dan takut melakukan pelanggaran karena sebatas takut dihukum.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasinya adalah perangkat desa yang menjabat sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur keuangan, dan Kasi

Pemerintahan dengan jumlah 72 aparat desa yang diperoleh dari 18 kantor desa di Kecamatan Plumpang. Pengambilan sampel menggunakan teknik *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data subyek berupa tanggapan tertulis dari responden dengan sumber data primer yang dikumpulkan atau diambil langsung oleh peneliti dari sumbernya, yaitu kuesioner yang dikirimkan ke 18 kantor pemerintahan desa di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban sesuai dengan kriteria sampel. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan jalur (*path*) PLS. Metode PLS menggunakan *software* SmartPLS 3.0.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen (Y)

Pencegahan kecurangan adalah upaya yang dapat dilakukan dengan tujuan mengurangi risiko terjadinya tindakan yang dapat merugikan organisasi. Penelitian ini menggunakan lima indikator berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yusuf et al., 2021) yaitu dengan menetapkan kebijakan anti fraud, menciptakan prosedur pencegahan baku, membangun struktur organisasi dengan pengendalian yang baik, membuat teknik pengendalian yang efektif, dan menumbuhkan kesadaran terhadap kecurangan. Diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala likert 1-5 poin.

Variabel Independen (X)

1. *Good Government Governance*

Good government governance adalah penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsipnya dan dapat dipertanggungjawabkan, yang mampu mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan, dalam kasus ini yaitu pengelolaan dana desa. *Good government governance* diukur dengan menggunakan tiga indikator yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi (Prameswari et al., 2022). Diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala likert 1-5 poin.

2. *Moralitas individu*

Moralitas individu adalah nilai yang terkait dengan baik dan buruknya sifat manusia yang mengacu pada teori perkembangan moral yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat penalaran moral individu (Yusuf et al., 2021). Moralitas individu diukur dengan menggunakan empat indikator, yaitu kesadaran seorang aparat desa terhadap tanggung jawab yang diberikan, kesadaran dalam menjunjung nilai kejujuran dan etika, menaati semua aturan yang berlaku di dalam sebuah organisasi, dan sikap individu terhadap tindakan tidak jujur (Rosari et al., 2021). Diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala likert 1-5 point.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistika Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis empiris tentang informasi yang dikumpulkan untuk memberikan gambaran tentang suatu peristiwa. Informasi tersebut berasal dari tanggapan yang diberikan responden terhadap pernyataan dalam kuesioner. Selanjutnya data yang diperoleh akan diolah dengan cara pengelompokan dan tabulasi, kemudian diambil rata-rata (mean) dan diberi penjelasan. Berikut adalah hasil uji analisis statistik deskriptif.

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Standar Deviasi
<i>Good Government Governance</i> (X1)	72	28.000	35.000	31.764	3.480
Moralitas Individu (X2)	72	24.000	30.000	27.347	2.969
Pencegahan Kecurangan (Y)	72	28.000	35.000	31.778	3.440
Valid N (Listwise)	72				

Sumber : Hasil Output SmartPLS (data diolah 2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah sampel sebanyak 72 responden. Nilai tertinggi variabel *good government governance* (X1) adalah (35,00) sedangkan nilai terendahnya (28,00), dan rata-rata variabelnya adalah (31,764). Nilai tertinggi variabel moralitas individu (X2) adalah (30,00) sedangkan nilai terendahnya (24,00) dengan rata-ratanya adalah (27,347). Nilai tertinggi variabel pencegahan kecurangan (Y) adalah (35,00) sedangkan nilai terendahnya (28,00), dan rata-rata variabel pencegahan kecurangan adalah (31,778).

Analisis Outer Model

1. *Convergent Validity*

Pengujian pada *convergent validity* dapat dilihat pada nilai *outer loading* masing-masing indikator variabel. Validitas setiap indikator dengan nilai *outer loading* di atas 0,7 maka indikator dikatakan telah memenuhi nilai validitas konvergen yang baik. Tetapi menurut (Chin, 1998) dalam (Babulu, 2020) nilai *outer loading* 0,5 sampai 0,6 masih dapat diterima. Dalam penelitian ini nilai *outer loading* setiap indikator diatas 0,7 sehingga indikator dinyatakan valid. Berikut merupakan tabel *outer loading* dari hasil pemrosesan dengan SmartPLS 3:

Tabel 3. Outer Loading

Variabel	Indikator	Outer Loading
<i>Good Government Governance</i>	X1.1	0.703
	X1.2	0.713
	X1.3	0.716
	X1.4	0.717
	X1.5	0.719
	X1.6	0.775
	X1.7	0.774
Moralitas Individu	X2.1	0.711
	X2.2	0.708
	X2.3	0.768
	X2.4	0.713
	X2.5	0.725
	X2.6	0.722
Pencegahan Kecurangan	Y.1	0.734
	Y.2	0.718
	Y.3	0.711
	Y.4	0.743
	Y.5	0.725
	Y.6	0.768
	Y.7	0.710

Sumber : Hasil Output SmartPLS (data diolah 2023)

2. Discriminant Validity

Discriminant validity dapat dilihat pada nilai *cross loading* pada setiap variabel dan nilai AVE. Indikator dinyatakan memenuhi *discriminant validity* jika nilai *cross loading* indikator pada variabelnya paling besar dibandingkan pada variabel lainnya. Sedangkan nilai *average variant extracted* (AVE) masing-masing indikator untuk model yang baik syarat nilainya harus $>0,5$.

Tabel 4. Nilai Cross Loading

Indikator	Variabel		
	Good Government Governance (X1)	Moralitas individu (X2)	Pencegahan Kecurangan (Y)
X1.1	0.703	0.175	0.275
X1.2	0.713	0.156	0.282
X1.3	0.716	0.078	0.239
X1.4	0.717	0.205	0.290
X1.5	0.719	0.246	0.284
X1.6	0.775	0.239	0.391
X1.7	0.774	0.181	0.367
X2.1	0.105	0.711	0.442
X2.2	0.088	0.708	0.506
X2.3	0.291	0.768	0.634
X2.4	0.149	0.713	0.418
X2.5	0.167	0.725	0.468
X2.6	0.258	0.722	0.573
Y.1	0.276	0.392	0.734
Y.2	0.199	0.511	0.718
Y.3	0.340	0.465	0.711
Y.4	0.283	0.600	0.743
Y.5	0.213	0.470	0.725
Y.6	0.430	0.701	0.768
Y.7	0.382	0.380	0.710

Sumber : Hasil Output SmartPLS (data diolah 2023)

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai *cross loading* masing-masing indikator pada variabelnya lebih besar dibandingkan dengan *cross loading* indikator dari variabel lainnya. Sehingga variabel dikatakan memiliki *validitas discriminant* yang baik.

Tabel 5. Nilai Average Variant Extracted (AVE)

Variabel	Average Variant Extracted (AVE)
Good Government Governance (X1)	0.535
Moralitas individu (X2)	0.525
Pencegahan Kecurangan (Y)	0.533

Sumber : Hasil Output SmartPLS (data diolah 2023)

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel memiliki validitas yang baik karena mempunyai nilai *average variant extracted* (AVE) $>0,5$.

3. Composite Reliability

Dalam uji reliabilitas suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai *composite reliability* maupun *conbach's alpha* di atas 0,7. Hasil *composite reliability* dapat dilihat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Nilai Composite Reliability

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Good Government Governance (X1)	0.857	0.890
Moralitas individu (X2)	0.820	0.869
Pencegahan Kecurangan (Y)	0.856	0.889

Sumber : Hasil Output SmartPLS (data diolah 2023)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai dari masing-masing variabel memiliki reliabilitas yang baik karena nilai composite reliability dan cronbach's alpha diatas 0,7.

Analisis Inner Model

Pada analisis inner model, model struktural dievaluasi menggunakan *R-square*, *F-square* atau *effect size* dan juga dengan melihat nilai koefisien path.

Tabel 7. Tabel R-Square

	R Square	Adjusted R Square
Pencegahan Kecurangan (Y)	0.571	0.559

Sumber : Hasil Output SmartPLS (data diolah 2023)

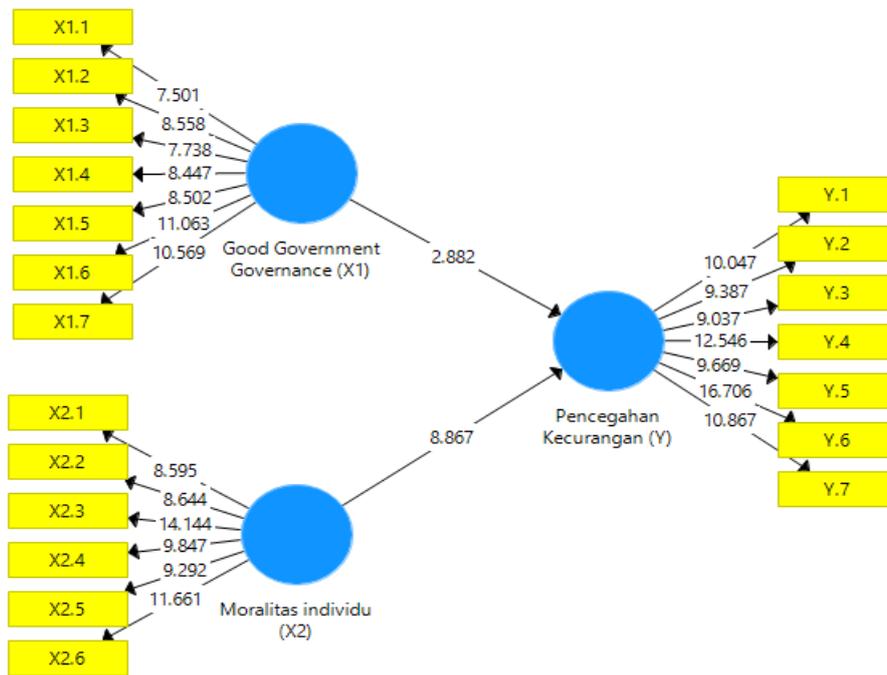
Dalam tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai *R-square* 0,571 yang artinya variabel pencegahan kecurangan dipengaruhi sebesar 57,1% oleh variabel *good government governance* dan moralitas individu. Sedangkan sisanya yaitu 42,9% dipengaruhi variabel lainnya diluar model penelitian ini.

Tabel 8. Tabel F-square

	Good Government Governance (X1)	Moralitas individu (X2)	Pencegahan Kecurangan (Y)
Good Government Governance (X1)			0.147
Moralitas individu (X2)			0.911
Pencegahan Kecurangan (Y)			

Sumber : Hasil Output SmartPLS (data diolah 2023)

Dalam tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai *f-square* pada variabel *good government goveranance* terhadap pencegahan kecurangan sebesar 0,147 yang artinya mempunyai pengaruh lemah. Sedangkan variabel moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan sebesar 0,911 yang artinya mempunyai pengaruh kuat. Berikut merupakan gambar model struktural dari hasil pengolahan SmartPLS 3.



Gambar 2. Model Struktural

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat hasil penelitian dari pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis untuk melihat nilai signifikansi t-statistic dapat dilihat dari nilai *path coefficients*. Untuk menolak atau menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a diterima jika nilai p-value < 0,05.

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample	T Statistik	P Values	Hipotesis
<i>Good Government Governance (X1) -> Pencegahan Kecurangan (Y)</i>	0.260	2.678	0.008	Diterima
<i>Moralitas individu (X2) -> Pencegahan Kecurangan (Y)</i>	0.647	9.012	0.000	Diterima

Sumber : Hasil Ouput SmartPLS (data diolah 2023)

$$Y = a + 0,260 + 0,647 + e$$

Berdasarkan tabel diatas hasil uji hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis variabel *good government governance* terhadap pencegahan kecurangan sebesar 0,260 dengan nilai p-value 0,008 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa *good government governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
2. Hasil uji hipotesis variabel moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan sebesar 0,647 dengan nilai p-value 0,000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Pengaruh Good Government Governance Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) menunjukkan bahwa *good government governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *good government governance* maka pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa semakin meningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa *good government governance* merupakan salah satu hal penting dalam mencegah tindakan kecurangan. Penerapan *good government governance* yang baik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan keuangan desa merupakan hasil dari keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, proses dari hasil pengelolaan dana desa yang harus disajikan dan dilaporkan oleh perangkat desa untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan anggaran. Sebaliknya jika prinsip tersebut tidak diterapkan akan berdampak pada pengelolaan dana dan memudahkan pelaku melakukan tindakan kecurangan karena dalam pengelolaan dana tidak ada keterbukaan dari proses anggaran, tidak ada tanggung jawab mengenai pelaporan keuangan yang tepat dari pemerintah desa dan tidak melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dan mengontrol kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan teori kontijensi yang memusatkan perhatian sesuai dengan situasi atau masalah yang terjadi, oleh karena itu *good government governance* harus diterapkan sebaik mungkin agar kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diminimalisir. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prameswari et al., 2022), (Hidayati & Widiastuti, 2019) dan (Ferdyanti & Priono, 2022) yang menunjukkan bahwa *good government governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dengan moral yang baik mampu mengendalikan dirinya dari tindakan yang tidak baik seperti tindakan kecurangan, dalam penelitian ini yaitu pada pengelolaan dana desa. Semakin tinggi tahapan penalaran moral seseorang maka semakin baik dan benar perilaku yang ditunjukkan. Hal ini didukung oleh teori perkembangan moral yaitu pada tahap tertinggi (*post conventional*) individu akan lebih memperhatikan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, sehingga individu bisa lebih menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya dalam melakukan pekerjaannya. Moralitas individu dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa agar dana bisa tersalurkan dengan baik sesuai rancangan pembangunan yang dibutuhkan desa dan berguna bagi masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Ayu, 2021), (Aprilia & Yuniasih, 2021) dan (Hariawan et al., 2020) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah variabel *good government governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good government governance* yang baik sesuai dengan prinsipnya yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dapat menjadi upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Variabel moralitas individu juga berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang dengan moral yang baik mampu menghindari perilaku yang tidak baik seperti berbuat curang dalam mengelola keuangan. Sehingga moralitas individu yang baik juga menjadi salah satu upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat disampaikan pada penelitian selanjutnya adalah :

1. Menambah variabel penelitian terkait dengan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dengan variabel-variabel yang lain, seperti *whistleblowing system*, budaya organisasi, pengendalian internal dll.
2. Memperluas wilayah cakupan sampel tidak hanya dikecamatan plumpang saja tetapi bisa di kecamatan lainnya di tuban agar memperoleh perbandingan hasil.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan data yang diperoleh bukan hanya dari jawaban kuesioner dari responden tetapi perlu melakukan wawancara yang mendalam kepada aparatur desa yang sesuai dengan konsep penelitian.

Referensi:

- Anandya, C. R., & Werastuti, D. N. S. (2020). Pengaruh *Whistleblowing System*, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 185-194.
- Aprilia, K. W. I., & Yuniasih, N. W. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 25-45.
- Babulu, N. L. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pencegahan *Fraud*. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 18-26.
- Chin, W. W. (1998). *Commentary: Issues and Opinion on Structural Equation Modeling*. In *Mis Quarterly* (Pp. Vii-Xvi). Jstor.
- Dewi, P. F. K., Yuniarta, G. A., Ak, S. E., Si, M., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Moralitas, Integritas, Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Internal Kas Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Studi pada Desa di Kabupaten Buleleng). *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).

- Ferdyanti, G. E., & Priono, H. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan APBDes di Kecamatan Prambon. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 28–34.
- Hariawan, I. M. H., Sumadi, N. K., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Whistleblowing System*, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 586–618.
- Hidayati, F. K., & Widiastuti, H. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Government Governance* Terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan.
- ICW. (2021). Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021. Available At: [https://Antikorupsi.Org/Sites/Default/Files/ Dokumen/Laporan Pemantauan Tren Penindakan Semester I 2021.Pdf](https://Antikorupsi.Org/Sites/Default/Files/Dokumen/Laporan%20Pemantauan%20Tren%20Penindakan%20Semester%20I%202021.Pdf).
- Inawati, W. A., & Sabila, F. H. (2021). Pencegahan *Fraud*: Pengaruh *Whistleblowing System*, *Government Governance* dan Kompetensi Aparatur Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(3), 731–745.
- Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 2155–2182.
- Lestari, I. A. M. E., & Ayu, P. C. (2021). Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 101–116.
- Liyanarachchi, G., & Newdick, C. (2009). *The Impact of Moral Reasoning and Retaliation on Whistle-Blowing: New Zealand Evidence*. *Journal Of Business Ethics*, 89(1), 37–57.
- Nisa, A., & Suwandi, S. (2022). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan: Peran Moderasi Corporate Sosial Responsibility. *Proceeding Umsurabaya*, 1(1).
- Pramesti, M. A. D., Sunarsih, N. M., & Dewi, N. P. S. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Kompensasi dalam Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 2(2).
- Prameswari, K. S., Ayu, P. C., & Pratiwi, N. P. T. W. (2022). Pengaruh *Whistleblowing*, SPIP, *Good Governance*, dan Kompetensi Terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 252–269.
- Pratiwi, D. A. (2022). Peran Strategi Bisnis Terhadap Nilai Perusahaan dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Mediasi. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 8(2), 105–124.

Rosari, R., Zacharias, J., & Pono, M. R. (2021). Pencegahan *Fraud* dalam Pelaporan Keuangan: Pendekatan Faktor Individu. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 24(2), 251-276.

Yusuf, M., Ibrahim, I., & Waty, F. I. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(2), 1-12.

<https://Tuban.Inews.Id/Read/290362/Diduga-Korupsi-Dana-Desa-Kepala-Desa-Resmi-Ditahan-Di-Lapas>